

MANAJEMEN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA WISATA BERBASIS MASYARAKAT PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN TORAJA UTARA

Yanto Maluka, M. Nasir Hamzah, St Rukaiyah

Universitas Fajar¹²³

farrel.io.vai@gmail.com, natsirhamzah@gmail.com rukaiyah@unifa.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini menekankan pentingnya peran pemerintah dalam tata kelola desa wisata di Kabupaten Toraja Utara untuk mendukung keberlanjutan dan keberhasilan pariwisata berbasis masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan kebijakan, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta strategi pemasaran yang tepat mampu menjadikan desa wisata sebagai destinasi unggulan yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya bagi masyarakat setempat. Manajemen tata kelola berbasis masyarakat terbukti berdampak positif terhadap Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui pelestarian adat istiadat, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan ekonomi lokal. Selain itu, keterlibatan stakeholder seperti pemerintah daerah, komunitas adat, dan sektor swasta berperan penting dalam menjaga keberlanjutan desa wisata. Rekomendasi penelitian ini meliputi peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan, pelestarian budaya lokal, penguatan infrastruktur, digitalisasi promosi, kolaborasi lintas sektor, pengelolaan lingkungan berkelanjutan, serta diversifikasi produk wisata. Dengan strategi ini, desa wisata di Kabupaten Toraja Utara diharapkan dapat berkembang secara optimal sekaligus mempertahankan identitas budaya dan kearifan lokalnya.

Kata Kunci : Tata Kelola Desa Wisata, Pariwisata Berbasis Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat, Pelestarian Budaya, Keberlanjutan Pariwisata.

ABSTRACT

This study highlights the crucial role of government in managing tourism villages in North Toraja Regency to ensure the sustainability and success of community-based tourism. The findings indicate that supportive policies, infrastructure development, community empowerment, and effective marketing strategies enable tourism villages to become leading destinations that provide economic, social, and cultural benefits to local communities. Community-based governance significantly impacts the Department of Culture and Tourism and enhances villagers' quality of life through cultural preservation, job creation, and local economic growth. Furthermore, the involvement of stakeholders such as local government, traditional communities, and the private sector plays a vital role in maintaining the sustainability of tourism villages. The study recommends several strategies, including capacity building through training, cultural preservation, infrastructure improvement, digital tourism promotion, multi-stakeholder collaboration, sustainable environmental management, and tourism product diversification. By implementing these strategies, tourism villages in North Toraja Regency can achieve optimal development while maintaining their cultural identity and local wisdom.

Keywords : Tourism Village Governance, Community-Based Tourism, Community Empowerment, Cultural Preservation, Tourism Sustainability.

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam sebuah negara merupakan kebutuhan yang tidak bisa dihindari. Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perhatian yang lebih serius perlu diberikan, mengingat sebelumnya

pemerintah desa masih diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pengaturan desa melalui undang-undang khusus menunjukkan adanya kemauan politik pemerintah untuk menjadikan desa sebagai fondasi pembangunan. Hal ini sejalan dengan visi dan misi undang-undang tersebut, yaitu melindungi sekaligus memberdayakan desa agar mampu menjadi kuat, mandiri, serta demokratis sehingga tercipta pijakan yang kokoh dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan menuju masyarakat adil, makmur, serta sejahtera.

Pembangunan adalah proses perubahan yang dilakukan secara sadar, terencana, dan berkesinambungan dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia saat ini tengah mendorong pembangunan berkelanjutan yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Kemajuan pembangunan di Indonesia lebih cepat terjadi di wilayah perkotaan karena jumlah penduduk dan aktivitas yang lebih padat, sehingga menimbulkan kesenjangan antara kota dan desa. Pada level pemerintahan desa, desa merupakan entitas masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional serta berada dalam wilayah kabupaten.

Desa menjadi ujung tombak pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang, baik pemerintahan, pembangunan, maupun kemasyarakatan, serta tugas pembantuan yang bersifat integral dan tidak dapat dipisahkan dari aspek kehidupan masyarakat. Pemahaman mengenai desa seharusnya menempatkan desa sebagai bagian penting dari pembangunan nasional, yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia pedesaan secara berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi lokal. Pembangunan desa seyogianya diarahkan pada tercapainya kemandirian, kemajuan, kesejahteraan, serta keadilan bagi masyarakat pedesaan.

Desa wisata adalah kawasan pedesaan yang memiliki potensi dan karakteristik tertentu sehingga layak dikembangkan menjadi destinasi wisata. Penduduknya umumnya masih memelihara tradisi dan budaya asli, didukung oleh faktor lain seperti kuliner khas, sistem pertanian, serta kehidupan sosial. Selain itu, sumber daya alam dan lingkungan yang terjaga menjadi daya tarik utama. Sebagian besar potensi wisata alam dan budaya memang berada di pedesaan, sejalan dengan kenyataan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di desa. Oleh karena itu, pemanfaatan potensi desa sebagai kawasan wisata diharapkan memberi manfaat besar bagi masyarakat.

Dalam aktivitas pariwisata, wisatawan membutuhkan barang maupun jasa. Masyarakat desa yang memperoleh keuntungan dari kedatangan wisatawan biasanya terdorong untuk menjaga kelestarian lingkungan serta budaya. Jika alam dan budaya rusak, desa tersebut akan kehilangan daya tarik wisatawan dan otomatis menurunkan pendapatan masyarakat. Dengan demikian, pengembangan desa wisata berperan menjaga kelestarian sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan serta budaya melalui keterlibatan aktif masyarakat.

Kabupaten Toraja Utara sendiri memiliki potensi alam dan budaya yang beragam, antara lain wisata alam, outbound, tarian tradisional, upacara adat ma'nene, rambu solo', wisata edukasi peternakan kerbau, hingga hamparan sawah luas. Semua potensi ini dapat digali dan dikembangkan oleh pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memberdayakan mereka secara berkelanjutan.

Namun, tidak semua potensi tersebut berhasil dikembangkan dengan baik. Hanya beberapa yang berkembang pesat, terutama wisata panorama alam yang menjadi primadona wisatawan. Pengembangan sektor ini didukung oleh partisipasi aktif masyarakat. Sebaliknya,

beberapa potensi lain belum termanfaatkan secara maksimal karena rendahnya minat dan keterlibatan masyarakat dalam menjadikannya produk unggulan wisata desa.

Masyarakat Toraja Utara masih menghadapi kendala dalam berpartisipasi aktif akibat minimnya motivasi serta pengetahuan mengenai konsep desa wisata. Keterbatasan sumber daya manusia menyebabkan banyak potensi tidak tergarap maksimal untuk dijadikan objek wisata unggulan. Rendahnya partisipasi masyarakat dapat menghambat laju pembangunan wisata, meskipun sebenarnya potensi yang dimiliki cukup melimpah. Sebagian besar masyarakat desa masih menggantungkan hidup pada sektor pertanian sehingga dibutuhkan tata kelola pemerintahan desa wisata yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengambilan keputusan, dan evaluasi.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Teori Manajemen

Manajemen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Manajemen adalah pimpinan yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan dan organisasi. John D. Millet (Sukarna, 2011: 2), dalam buku *Management In The Public Service* menyatakan *Management Is The Process Of Directing And Facilitating The Work Of People In Formal Group To Achieve A Desired End*. (Manajemen adalah proses pembimbingan dan pemberian fasilitas terhadap pekerjaan orang-orang yang terorganisir dalam kelompok formal untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki). Manajemen menurut Hasibuan dalam Torang (2013 : 165) adalah ilmu dan seni untuk mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Sejalan dengan pendapat diatas, Miller dalam Torang (2013:166) menyatakan bahwa manajemen adalah proses memimpin dan melancarkan pekerjaan bagi orang-orang yang terorganisir secara formal sebagai kelompok untuk memperoleh tujuan yang diinginkan.

Konsep Desa Wisata

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), manajemen diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan tertentu. Selain itu, manajemen juga dipahami sebagai pihak pimpinan yang bertanggung jawab dalam mengendalikan jalannya organisasi maupun perusahaan. Sejalan dengan itu, John D. Millet dalam **Management in the Public Service** menjelaskan bahwa manajemen merupakan proses membimbing dan memfasilitasi pekerjaan sekelompok orang dalam organisasi formal untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Hasibuan (dalam Torang, 2013) mendefinisikan manajemen sebagai ilmu sekaligus seni dalam mengatur pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif serta efisien guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Definisi ini sejalan dengan pendapat Miller (Torang, 2013) yang menekankan bahwa manajemen adalah proses memimpin dan melancarkan pekerjaan kelompok secara formal agar tujuan dapat tercapai. Sementara itu, Terry dalam **Principles of Management** menegaskan bahwa manajemen merupakan upaya pencapaian tujuan yang telah ditentukan melalui kerja sama dengan orang lain. Dengan demikian, manajemen memiliki peran vital dalam setiap aktivitas organisasi karena berorientasi pada proses, yang melibatkan pengetahuan, keterampilan, dan koordinasi sumber daya.

Organisasi Tata Kelola Bidang Pariwisata

Organisasi pengelolaan destinasi pariwisata atau *Destination Management Organization (DMO)* menjadi salah satu topik penting dalam kajian akademis, karena konsep ini banyak digunakan oleh berbagai destinasi dalam mengelola potensi wisata. Bentuk tata kelola destinasi sangat dipengaruhi oleh kebutuhan serta kepentingan organisasi pengelola (Junaid, 2015; Pearce, 2015). Pada praktiknya, *DMO* dapat dibentuk pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, bahkan wilayah administratif yang lebih kecil. Selain itu, organisasi ini dapat pula berbasis pada pengelolaan daya tarik wisata tertentu yang menuntut profesionalisme, sehingga mampu memperkuat daya saing destinasi.

Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Secara etimologis, kata pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan, tenaga, atau kemampuan untuk bertindak. Dalam bahasa Inggris, istilah ini diterjemahkan dari kata *empower* yang menurut Merriam Webster dan Oxford Dictionary memiliki dua makna utama: (1) memberi kuasa atau mendelegasikan otoritas kepada pihak lain, dan (2) memberikan kemampuan atau membuat seseorang berdaya (Ambar Teguh, 2004).

Chatarina Rusmiyati (2011) memandang pemberdayaan sebagai proses yang memungkinkan individu, organisasi, dan komunitas untuk menguasai kehidupannya sendiri. Proses ini bersifat aktif, melibatkan motivator, fasilitator, dan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, serta pemberian akses terhadap sumber daya yang menunjang kesejahteraan.

Tata kelola Pemerintahan Desa.

Dalam bidang pariwisata, konsep organisasi tata kelola destinasi (*destination management organization/DMO*) menjadi perhatian penting karena berfungsi mengelola potensi wisata secara terarah. Bentuk tata kelola destinasi sangat dipengaruhi oleh kebutuhan serta kepentingan daerah atau lembaga pengelola (Junaid, 2015; Pearce, 2015). *DMO* dapat dikelola pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, bahkan desa atau wilayah administratif yang lebih kecil. Selain itu, organisasi ini juga dapat dibentuk untuk mengelola daya tarik wisata tertentu yang memerlukan pengelolaan profesional agar mampu menunjang pengembangan destinasi secara berkelanjutan.

Longjit dan Pearce (2013) mengklasifikasikan tata kelola destinasi ke dalam tiga aspek utama: tujuan, aktivitas, dan struktur organisasi. Tujuan merujuk pada target yang hendak dicapai, aktivitas mencakup berbagai program atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, sedangkan struktur organisasi adalah inti yang menentukan pola kerja lembaga pengelola destinasi wisata.

Menurut Pearce (2015), peran *DMO* antara lain: (1) membantu pemasaran, branding, dan positioning destinasi; (2) mengembangkan serta mengelola produk wisata; (3) menyusun perencanaan, implementasi, dan evaluasi program pariwisata; (4) memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pariwisata; serta (5) menyampaikan informasi kepada wisatawan sekaligus mensosialisasikan manfaat pariwisata bagi masyarakat. Dengan demikian, organisasi tata kelola pariwisata tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga pada pelestarian sumber daya wisata.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan naturalistik, yang artinya data dikumpulkan secara langsung di lokasi penelitian. Tipe penelitian ini adalah

deskriptif kualitatif, yang bertujuan memberikan gambaran mendalam tentang fenomena atau situasi yang dialami oleh masyarakat setempat.

Adapun fokus penelitian ini meliputi:

1. Pengelolaan Desa Wisata: Bagaimana desa wisata berbasis masyarakat di Kabupaten Toraja Utara dapat mengoptimalkan potensi lokal untuk bersaing dengan sektor pariwisata skala besar.
2. Perencanaan: Proses sistematis dalam merancang suatu kegiatan, mulai dari pengambilan keputusan mengenai apa, kapan, dan di mana kegiatan akan dilaksanakan.
3. Pengorganisasian: Proses menugaskan individu pada tugas tertentu dan mendelegasikan wewenang untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.
4. Pelaksanaan: Upaya mewujudkan rencana yang telah disusun untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
5. Pengawasan: Proses memantau dan mengevaluasi hasil pelaksanaan, membandingkannya dengan perencanaan awal, dan membuat perbaikan yang diperlukan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Manajemen Tata Kelola Pemerintahan Desa Wisata Berbasis Masyarakat Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara.

Desa wisata di Toraja Utara dikelola dengan konsep *Community-Based Tourism (CBT)* yang menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap aspek pengelolaan. Konsep ini memungkinkan masyarakat menjadi pelaku utama dalam pengembangan pariwisata, mulai dari penyediaan akomodasi berbasis rumah adat, pengelolaan objek wisata, hingga pelestarian budaya.

Dalam sistem ini, terdapat beberapa elemen penting yang mendukung keberlanjutan desa wisata, antara lain:

1. Peran Pemerintah Desa: Pemerintah desa memiliki peran dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pengelolaan desa wisata. Regulasi yang dibuat harus memastikan bahwa adat istiadat tetap menjadi nilai utama dalam pengembangan pariwisata.
2. Lembaga Adat: Sebagai penjaga warisan budaya, lembaga adat memastikan bahwa segala aktivitas pariwisata tidak bertentangan dengan norma-norma dan tradisi yang telah ada.
3. Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata): Organisasi ini bertanggung jawab dalam pengelolaan objek wisata, pelayanan kepada wisatawan, serta promosi desa wisata.
4. BUMDes (Badan Usaha Milik Desa): Lembaga ini mengelola pendapatan yang diperoleh dari sektor wisata dan mengalokasikannya untuk kesejahteraan masyarakat serta pengembangan infrastruktur desa.

Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan desa wisata berbasis masyarakat adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara komersialisasi dan pelestarian budaya. Di Toraja Utara, banyak upacara adat seperti Rambu Solo' (upacara kematian) dan Rambu Tuka' (upacara syukuran) yang menjadi daya tarik bagi wisatawan. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, ada risiko bahwa ritual-ritual ini akan kehilangan makna spiritualnya dan hanya menjadi tontonan bagi wisatawan.

Tata kelola desa wisata di Toraja Utara membutuhkan sinergi antara berbagai stakeholder, baik dari sektor pemerintah, masyarakat, akademisi, maupun pelaku usaha. Berikut ini adalah beberapa stakeholder utama dan peran mereka:

1. Pemerintah Daerah: Menyediakan regulasi, infrastruktur, serta pelatihan bagi masyarakat dalam mengelola wisata.

2. Lembaga Adat: Bertanggung jawab dalam menjaga nilai-nilai budaya tetap menjadi bagian utama dari aktivitas pariwisata.
3. Pokdarwis dan BUMDes: Mengelola objek wisata serta mengalokasikan pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat.
4. Pelaku Usaha Lokal: Berperan dalam penyediaan akomodasi, transportasi, dan produk lokal yang berbasis budaya.
5. Akademisi dan Lembaga Riset: Memberikan rekomendasi ilmiah untuk pengembangan pariwisata yang berkelanjutan.
6. Wisatawan: Berkontribusi dalam mendukung ekonomi masyarakat lokal dengan tetap menghormati budaya setempat.

Dengan keterlibatan semua pihak, desa wisata dapat berkembang secara harmonis tanpa mengganggu keseimbangan budaya dan lingkungan.

Walaupun model tata kelola berbasis masyarakat ini memberikan manfaat besar, masih ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, antara lain:

1. Komersialisasi Berlebihan: Beberapa ritual adat berisiko kehilangan makna aslinya karena dipertontonkan untuk wisatawan. Solusi yang diterapkan adalah membatasi akses wisatawan ke acara adat tertentu serta meningkatkan pemahaman tentang budaya lokal.
2. Infrastruktur yang Belum Memadai: Banyak desa wisata masih sulit diakses akibat kondisi jalan yang kurang baik. Pemerintah perlu mengalokasikan dana khusus untuk pembangunan infrastruktur.
3. Kurangnya Keterampilan Masyarakat dalam Pengelolaan Wisata: Masih banyak warga yang belum memiliki keterampilan dalam pelayanan wisata dan pemasaran digital. Pelatihan berkelanjutan sangat diperlukan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di desa wisata.

Tata kelola desa wisata berbasis masyarakat di Kabupaten Toraja Utara merupakan pendekatan yang ideal dalam mengembangkan sektor pariwisata tanpa mengabaikan adat istiadat yang telah diwariskan turun-temurun. Dengan mengedepankan prinsip partisipasi masyarakat, pelestarian budaya, serta transparansi dalam pengelolaan, desa wisata di Toraja Utara dapat menjadi model wisata berkelanjutan yang tetap menghormati kearifan lokal.

Dampak Manajemen Tata Kelola Pemerintahan Desa Wisata Berbasis Masyarakat Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara Terhadap Kualitas Hidup Masyarakat Desa.

Manajemen tata kelola desa wisata berbasis masyarakat (Community-Based Tourism, CBT) di Toraja Utara melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah desa, tokoh adat, masyarakat lokal, hingga sektor swasta dan akademisi. Berikut adalah aspek utama dalam tata kelola pemerintahan desa wisata berbasis masyarakat yang menghormati adat istiadat:

1. Struktur Pemerintahan Desa Wisata

Pemerintahan desa wisata di Toraja Utara menerapkan model kepemimpinan kolaboratif yang melibatkan berbagai elemen dalam masyarakat, yaitu:

- a) Kepala Desa: Bertanggung jawab atas kebijakan desa yang berkaitan dengan pengelolaan wisata dan kesejahteraan masyarakat.
- b) Lembaga Adat: Mengawal implementasi nilai-nilai budaya dalam aktivitas wisata agar tidak bertentangan dengan adat setempat.
- c) Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata): Mengelola dan mengembangkan destinasi wisata berbasis masyarakat.

- d) BUMDes (Badan Usaha Milik Desa): Mengelola pendapatan desa dari sektor pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat.
- e) Komunitas Pemuda dan Perempuan: Terlibat dalam promosi, pelayanan wisata, serta produk kreatif berbasis budaya.

Dampak positif:

- a) Pemerintahan desa menjadi lebih inklusif dan berbasis partisipasi masyarakat.
- b) Adat istiadat tetap dihormati dalam pengelolaan wisata.
- c) Ekonomi desa meningkat dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.

2. Prinsip Tata Kelola Desa Wisata Berbasis Masyarakat dan Adat

Dalam pengelolaan desa wisata, ada beberapa prinsip utama yang diterapkan di Toraja Utara:

a) Partisipasi Aktif Masyarakat Lokal

1. Warga desa terlibat langsung dalam pengelolaan wisata sebagai pemandu, pemilik homestay, pengrajin souvenir, dan penyedia kuliner khas.
2. Adat dan budaya lokal dipertahankan melalui atraksi wisata berbasis tradisi seperti Rambu Solo' (upacara kematian) dan Rambu Tuka' (upacara syukuran).
3. Pelestarian rumah adat Tongkonan sebagai bagian dari daya tarik wisata dan identitas budaya.

b) Keberlanjutan dan Pelestarian Adat

1. Pemerintah desa menerapkan regulasi agar ritual adat tidak dikomersialisasi secara berlebihan dan tetap dijalankan sesuai tradisi.
2. Pengelolaan lingkungan dilakukan melalui program konservasi hutan dan sumber air di sekitar objek wisata.
3. Adanya aturan ketat bagi wisatawan terkait etika dalam berkunjung, termasuk larangan menyentuh atau merusak situs makam batu dan megalitikum.

c) Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan

1. Keuangan desa dari hasil wisata dikelola oleh BUMDes dan Pokdarwis dengan sistem laporan terbuka.
2. Dana wisata digunakan untuk pengembangan infrastruktur, pelestarian budaya, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

d) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

1. Pelatihan pemandu wisata berbasis budaya dilakukan agar masyarakat mampu menjadi tuan rumah yang baik.
2. Produk lokal seperti kopi Toraja, tenun, dan ukiran khas dipromosikan sebagai bagian dari paket wisata.
3. Sistem ekonomi berbasis desa diterapkan, di mana wisatawan didorong untuk berbelanja langsung dari pengrajin lokal.

Dampak positif:

- a. Masyarakat mendapatkan manfaat ekonomi langsung dari wisata.
- b. Kearifan lokal tetap terjaga dan tidak tergerus oleh pariwisata massal.
- c. Desa menjadi mandiri dalam mengelola wisata tanpa ketergantungan pihak luar.

3. Sinergi Stakeholder dalam Tata Kelola Desa Wisata

Agar tata kelola pemerintahan desa wisata berjalan optimal, diperlukan sinergi antara berbagai stakeholder:

Tabel Peran Dalam Pengelolaan Desa Wisata

STAKEHOLDER	PERAN DALAM PENGELOLAAN DESA WISATA
Pemerintah Daerah (Dinas Pariwisata Toraja Utara)	Memberikan regulasi, bantuan infrastruktur, dan pelatihan bagi masyarakat.
Lembaga Adat dan Tetua Kampung	Menjaga agar aktivitas wisata tidak bertentangan dengan adat.
Pokdarwis dan BUMDes	Mengelola objek wisata, pemasaran, dan pendapatan desa.
Pelaku Usaha Lokal	Menyediakan akomodasi, transportasi, serta produk dan jasa berbasis budaya.
Akademisi dan Lembaga Riset	Membantu dalam pengembangan konsep wisata berkelanjutan dan strategi pemasaran.
Wisatawan	Menghormati budaya lokal dan berkontribusi pada ekonomi desa.

Sumber : Data 2025

Dampak positif:

- a. Pariwisata berkembang secara harmonis tanpa mengganggu adat dan lingkungan.
- b. Keuntungan wisata tersebar merata di masyarakat.
- c. Desa wisata memiliki sistem pengelolaan yang profesional dan berkelanjutan.

4. Tantangan dalam Tata Kelola Desa Wisata di Toraja Utara

Meskipun sistem tata kelola berbasis masyarakat ini memberikan banyak manfaat, ada beberapa tantangan yang harus diatasi:

- a. Komersialisasi Berlebihan
 1. Beberapa atraksi budaya berisiko kehilangan makna aslinya jika hanya dipertontonkan untuk wisatawan.
 2. Solusi: Membatasi jumlah pengunjung pada acara adat tertentu dan mengedukasi wisatawan tentang makna spiritual budaya Toraja.
- b. Infrastruktur dan Aksesibilitas
 1. Banyak desa wisata masih sulit diakses akibat jalan yang kurang memadai.
 2. Solusi: Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk pembangunan akses jalan dan fasilitas umum di desa wisata.
- c. Peningkatan Kapasitas SDM Lokal
 1. Belum semua masyarakat memiliki keterampilan dalam hospitality dan digital marketing untuk mempromosikan desa wisata.
 2. Solusi: Pelatihan berkelanjutan bagi pemuda desa dalam bidang bahasa asing, manajemen wisata, dan pemasaran digital.

Tata kelola desa wisata berbasis masyarakat di Kabupaten Toraja Utara harus didasarkan pada partisipasi aktif warga, pelestarian adat, serta manajemen yang transparan dan akuntabel. Dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat adat, sektor swasta, akademisi, dan wisatawan, desa wisata di Toraja Utara dapat berkembang tanpa kehilangan identitas budaya dan nilai-nilai kearifan lokal.

1. Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

Salah satu dampak utama dari tata kelola desa wisata berbasis masyarakat adalah peningkatan kesejahteraan ekonomi. Dengan adanya program pemberdayaan yang diinisiasi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, masyarakat dapat secara langsung terlibat dalam industri pariwisata, baik sebagai penyedia jasa homestay, pemandu wisata, pengrajin, maupun pelaku UMKM lokal. Peningkatan jumlah wisatawan yang datang ke desa wisata membawa dampak positif berupa peningkatan pendapatan masyarakat dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pariwisata di Toraja Utara sangat erat kaitannya dengan adat dan budaya lokal. Keunikan rumah adat Tongkonan, upacara Rambu Solo' (ritual pemakaman), serta seni tari dan musik tradisional menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Melalui sistem tata kelola berbasis masyarakat, masyarakat desa memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian budaya mereka.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa pengembangan desa wisata tidak menghilangkan nilai-nilai adat yang telah diwariskan turun-temurun. Mereka bekerja sama dengan tetua adat dan tokoh masyarakat untuk mengintegrasikan budaya lokal ke dalam konsep wisata yang tetap menghormati tradisi asli. Dengan demikian, desa wisata tidak hanya menjadi sumber pendapatan, tetapi juga menjadi sarana edukasi bagi wisatawan mengenai kearifan lokal Toraja.

2. Pelestarian Adat Istiadat dan Budaya Lokal

Kabupaten Toraja Utara memiliki kekayaan budaya dan adat istiadat yang menjadi daya tarik utama pariwisata. Dengan tata kelola yang berbasis masyarakat, pengelolaan desa wisata tetap mempertahankan nilai-nilai budaya lokal. Ritual adat, rumah adat Tongkonan, serta seni tari dan musik tradisional tetap dilestarikan dan bahkan semakin berkembang karena menjadi bagian dari atraksi wisata. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berperan dalam memberikan edukasi dan pelatihan kepada masyarakat agar tradisi tetap autentik dan tidak mengalami komersialisasi yang merusak nilai budaya aslinya.

Pengelolaan desa wisata berbasis masyarakat juga berdampak pada pembangunan infrastruktur yang lebih baik. Dengan meningkatnya kunjungan wisatawan, pemerintah daerah dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melakukan investasi dalam pembangunan dan perbaikan infrastruktur, seperti jalan, fasilitas penginapan, pusat informasi wisata, serta sanitasi dan kebersihan lingkungan.

Peningkatan infrastruktur ini tidak hanya menguntungkan sektor pariwisata tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat desa dalam kehidupan sehari-hari. Akses jalan yang lebih baik, misalnya, memudahkan masyarakat untuk mengangkut hasil pertanian mereka ke pasar, sedangkan peningkatan jaringan komunikasi dan internet membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha berbasis digital.

3. Peningkatan Infrastruktur dan Aksesibilitas

Dengan berkembangnya desa wisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bersama pemerintah daerah turut berperan dalam pembangunan infrastruktur seperti akses jalan, fasilitas penginapan, serta sarana dan prasarana umum. Infrastruktur yang lebih baik tidak hanya mendukung sektor pariwisata tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat dalam aktivitas sehari-hari, termasuk dalam hal transportasi dan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan.

Pengelolaan desa wisata berbasis masyarakat juga berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Pariwisata yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan masalah seperti peningkatan limbah, eksploitasi sumber daya alam, serta kerusakan lingkungan akibat pembangunan yang tidak terkendali. Oleh karena itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mendorong penerapan konsep ekowisata yang berkelanjutan.

Program-program seperti penghijauan, pengelolaan sampah berbasis komunitas, serta penggunaan energi ramah lingkungan diterapkan untuk memastikan bahwa pertumbuhan industri pariwisata tidak merusak alam. Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan juga meningkat, karena mereka menyadari bahwa kelestarian alam menjadi aset utama dalam menarik wisatawan.

4. Peningkatan Kapasitas dan Pendidikan Masyarakat

Program pelatihan yang diadakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memberikan manfaat bagi masyarakat dalam peningkatan keterampilan, seperti pelatihan bahasa asing, manajemen usaha wisata, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Dengan meningkatnya kapasitas masyarakat dalam mengelola desa wisata, mereka memiliki peluang lebih besar untuk berkembang dan tidak hanya bergantung pada sektor pertanian atau pekerjaan tradisional lainnya.

Dengan sistem tata kelola berbasis masyarakat, masyarakat desa memiliki rasa memiliki terhadap desa wisata mereka. Mereka bukan hanya objek dari program pembangunan, tetapi juga aktor utama dalam perencanaan dan pengelolaan wisata. Partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pariwisata menciptakan komunitas yang lebih mandiri, solid, dan memiliki visi bersama dalam memajukan desa mereka.

Melalui keterlibatan langsung dalam pengelolaan desa wisata, masyarakat juga semakin sadar akan potensi daerah mereka dan pentingnya menjaga keseimbangan antara tradisi, ekonomi, dan lingkungan. Hal ini menciptakan siklus positif di mana pariwisata berkembang tanpa mengorbankan nilai-nilai lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun.

5. Dampak terhadap Lingkungan

Walaupun pariwisata memberikan dampak ekonomi yang positif, tata kelola yang kurang baik dapat berpotensi merusak lingkungan, seperti peningkatan sampah atau eksploitasi sumber daya alam. Oleh karena itu, dalam manajemen berbasis masyarakat, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengedepankan prinsip ekowisata yang berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat dalam program konservasi lingkungan, seperti penghijauan dan pengelolaan limbah wisata.

6. Meningkatnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

Dengan sistem tata kelola yang berbasis masyarakat, warga desa memiliki rasa memiliki terhadap pengelolaan desa wisata. Partisipasi aktif mereka dalam perencanaan dan pengambilan keputusan menciptakan komunitas yang lebih kuat dan mandiri. Selain itu, masyarakat juga semakin sadar akan pentingnya menjaga kelestarian budaya dan lingkungan demi keberlanjutan pariwisata di daerah mereka.

Manajemen tata kelola pemerintahan desa wisata berbasis masyarakat yang dijalankan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara memberikan dampak yang luas terhadap kualitas hidup masyarakat desa. Dengan pendekatan ini, desa wisata tidak hanya menjadi sumber ekonomi baru, tetapi juga menjadi alat pelestarian budaya, peningkatan infrastruktur, serta pemberdayaan masyarakat lokal.

Melalui keterlibatan masyarakat dalam seluruh aspek pengelolaan, desa wisata di Toraja Utara dapat berkembang dengan tetap mempertahankan adat dan tradisi yang menjadi identitas mereka. Dengan manajemen yang baik dan berkelanjutan, desa wisata tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek tetapi juga menjadi aset bagi generasi mendatang dalam menjaga warisan budaya dan alam Toraja.

Manajemen tata kelola pemerintahan desa wisata berbasis masyarakat yang dijalankan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara memiliki dampak yang luas terhadap kualitas hidup masyarakat. Selain meningkatkan kesejahteraan ekonomi, sistem ini juga membantu pelestarian budaya, perbaikan infrastruktur, peningkatan kapasitas masyarakat, serta perlindungan lingkungan. Dengan tata kelola yang baik dan berkelanjutan, desa wisata di Toraja Utara dapat berkembang tanpa mengorbankan adat istiadat serta kesejahteraan masyarakat lokal.

Peran *Stakeholder* Dalam Manajemen Tata Kelola Pemerintahan Desa Wisata Berbasis Masyarakat Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara.

Pengelolaan wisata di daerah dengan adat istiadat tinggi seperti Toraja Utara memerlukan sinergi antara berbagai stakeholder untuk memastikan keberlanjutan budaya dan ekonomi. Pemerintah, masyarakat adat, Pokdarwis, pihak swasta, akademisi, dan wisatawan harus bekerja sama agar pariwisata tetap berkembang tanpa menghilangkan nilai-nilai adat dan tradisi Toraja. Dengan pengelolaan yang tepat, Toraja Utara dapat terus menjadi destinasi wisata budaya unggulan yang tetap mempertahankan keunikan dan kearifan lokalnya.

1. Desa Nonongan Selatan

Desa Nonongan Selatan, yang terletak di Kecamatan Sopa, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan, menawarkan berbagai atraksi wisata yang memadukan keindahan alam dan kekayaan budaya lokal. Berikut beberapa destinasi wisata yang dapat ditemukan di desa ini:

- a. Sumur Dewata (Bubun Deata)
Sumur Dewata merupakan sumber mata air alami yang memiliki nilai spiritual bagi masyarakat setempat. Tempat ini sering dikunjungi oleh wisatawan yang ingin merasakan kesejukan airnya serta memahami tradisi dan kepercayaan lokal yang melekat padanya.
- b. Aktivitas Pertanian Tradisional
Desa Nonongan Selatan dikenal sebagai desa agraris yang menawarkan pengalaman wisata berbasis aktivitas keseharian masyarakat, seperti menanam padi (To Mangrengge Pare), menumbuk padi (To Ma'lambuk), memanen hasil hutan (To Mangrengge'Utan), dan mengambil air di sungai (To Mewai). Wisatawan dapat berpartisipasi langsung dalam kegiatan ini untuk memahami kehidupan sehari-hari masyarakat setempat.
- c. Tarian Tradisional
Desa ini kaya akan ragam tarian tradisional, seperti Pa'Gellu, tarian sukacita yang biasa dipentaskan pada upacara adat, dan Pa'randing, tarian yang mengawali prosesi upacara kematian. Tarian-tarian ini mencerminkan kekayaan budaya dan tradisi masyarakat Toraja yang masih lestari hingga kini.
- d. Kuliner Khas
Wisatawan dapat mencicipi kuliner khas seperti kue depatori, yang terbuat dari tepung beras dan gula merah, serta Pa'piong, olahan makanan seperti ayam, ikan, atau daging yang dimasak dengan bumbu khas dalam bambu. Kuliner ini menawarkan cita rasa autentik yang mencerminkan kekayaan kuliner lokal.
- e. Kerajinan Lokal

Di sekitar Nonongan, terdapat kerajinan arsitektur rumah adat Toraja dan kerajinan tenun tradisional. Wisatawan dapat menyaksikan proses pembuatan serta membeli hasil kerajinan sebagai souvenir khas dari desa ini.

Dengan berbagai atraksi tersebut, Desa Nonongan Selatan menawarkan pengalaman wisata yang unik, menggabungkan keindahan alam, kekayaan budaya, dan tradisi lokal yang masih terjaga dengan baik.

Pengelolaan wisata di Desa Nonongan Selatan, Kabupaten Toraja Utara, melibatkan berbagai stakeholder yang berperan dalam mendukung keberlanjutan dan pengembangan desa wisata. Berikut adalah peran masing-masing stakeholder:

1. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah, khususnya Dinas Pariwisata Toraja Utara, memiliki peran dalam:

- a. Penyusunan kebijakan dan regulasi untuk mendukung pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat.
- b. Penyediaan infrastruktur dasar, seperti akses jalan, fasilitas sanitasi, dan penerangan, guna meningkatkan kenyamanan wisatawan.
- c. Promosi dan pemasaran destinasi wisata melalui berbagai platform, baik nasional maupun internasional.
- d. Pendampingan dan pelatihan bagi masyarakat terkait manajemen pariwisata, pelayanan wisatawan, serta pelestarian budaya.

2. Masyarakat Lokal

Sebagai pelaku utama dalam desa wisata, masyarakat memiliki peran dalam:

- a. Pelestarian budaya dan adat istiadat melalui upacara adat, seni tari, serta produksi kuliner khas.
- b. Penyediaan layanan wisata seperti homestay, pemandu wisata, dan penyewaan kendaraan lokal.
- c. Konservasi lingkungan dengan menjaga kebersihan kawasan wisata dan sumber daya alam.
- d. Pengembangan ekonomi kreatif, misalnya melalui produksi souvenir khas Toraja, kerajinan tenun, dan kuliner tradisional.

3. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)

Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) memiliki tugas dalam:

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pariwisata dan dampaknya terhadap ekonomi desa.
- b. Mengelola objek wisata seperti Sumur Dewata (Bubun Deata), serta mengatur sistem tiket atau donasi bagi wisatawan.
- c. Meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan bagi pemandu wisata dan pelaku usaha lokal.
- d. Bersinergi dengan pemerintah dan pihak swasta dalam pengelolaan serta pengembangan fasilitas wisata.

4. Pihak Swasta dan Investor

Pihak swasta berperan dalam:

- a. Mendukung pengembangan fasilitas wisata, seperti akomodasi, restoran, dan transportasi.
- b. Menyediakan program CSR (Corporate Social Responsibility) yang berkontribusi pada pembangunan desa wisata.

- c. Berkolaborasi dengan UMKM lokal untuk membantu pemasaran dan distribusi produk khas desa.
5. Akademisi dan Lembaga Penelitian
 - a. Akademisi memiliki kontribusi dalam:
 - b. Melakukan penelitian dan kajian ilmiah terkait pengelolaan wisata berbasis masyarakat dan ekowisata.
 - c. Membantu dalam pelatihan dan edukasi terkait konservasi lingkungan serta strategi pengelolaan wisata yang berkelanjutan.
 6. Wisatawan

Wisatawan tidak hanya sebagai konsumen pariwisata, tetapi juga memiliki peran dalam:

 - a. Meningkatkan perekonomian desa dengan membeli produk lokal dan menggunakan jasa masyarakat.
 - b. Menjaga etika berwisata, seperti menghormati adat istiadat, tidak merusak lingkungan, serta mendukung konservasi budaya.
 - c. Memberikan feedback dan promosi melalui media sosial atau platform ulasan, yang dapat membantu meningkatkan daya tarik desa wisata.

Pengelolaan wisata di Desa Nonongan Selatan merupakan hasil kerja sama antara berbagai stakeholder, mulai dari pemerintah, masyarakat, Pokdarwis, pihak swasta, akademisi, hingga wisatawan. Kolaborasi yang baik antara semua pihak dapat memastikan desa wisata berkembang secara berkelanjutan, tetap mempertahankan kearifan lokal, serta memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat setempat.

2. Desa Wisata Landorundun

Desa Wisata Landorundun, terletak di kaki Gunung Sesean di Kecamatan Sesean Suloara', Kabupaten Toraja Utara, menawarkan beragam daya tarik wisata yang memukau. Berikut adalah beberapa destinasi dan aktivitas yang dapat dinikmati di desa ini:

a) Kampung Adat dengan Tongkonan dan Lumbung Tradisional

Dusun Tondoklitak di Desa Landorundun dikenal dengan deretan Tongkonan (rumah adat Toraja) dan lumbung padi tradisional yang seluruhnya terbuat dari kayu. Bangunan-bangunan ini dikelilingi oleh hamparan sawah yang luas, menciptakan pemandangan yang menawan dan memberikan wawasan mendalam tentang arsitektur serta kehidupan tradisional masyarakat Toraja.

b) Kuburan Batu Bersejarah

Desa ini memiliki situs kuburan batu seperti To'kua, Tobulan, dan Patiang Boro yang telah digunakan sejak tahun 1600-an. Terdapat sekitar 65 liang (makam) yang masih digunakan hingga saat ini, mencerminkan tradisi pemakaman unik masyarakat Toraja dan menawarkan pengalaman budaya yang kaya bagi para pengunjung.

c) Agrowisata Kopi Arabika

Di Dusun Londong Biang, wisatawan dapat menikmati pengalaman agrowisata dengan mengunjungi perkebunan kopi Arabika berkualitas tinggi. Proses produksi kopi, mulai dari pembibitan hingga pengolahan biji kopi siap konsumsi, dapat disaksikan langsung. Selain itu, terdapat PT. Toarco Jaya, perusahaan kopi yang didirikan oleh investor Jepang, yang berperan dalam memasarkan kopi Toraja ke pasar internasional.

d) Legenda Putri Landorundun

Desa ini juga dikenal sebagai tempat kelahiran legenda Putri Landorundun, seorang putri cantik dengan rambut panjang mencapai 300 jengkal atau 17 depa. Kisahnya yang menarik menambah daya tarik budaya dan sejarah desa ini.

e) Atraksi Budaya dan Kesenian Tradisional

Wisatawan dapat menyaksikan berbagai atraksi budaya seperti Sisemba' (permainan tradisional), upacara adat Rambu Tuka' (syukuran) dan Rambu Solo' (upacara kematian). Selain itu, terdapat kerajinan anyaman, tenun, manik-manik, ukiran, dan miniatur rumah adat Toraja yang diproduksi oleh masyarakat setempat.

f) Keindahan Alam dan Hutan Bambu To'kumila

Desa Landorundun menawarkan pemandangan alam yang menawan dengan udara sejuk khas pegunungan. Salah satu destinasi alam yang menarik adalah Hutan Bambu To'kumila, yang cocok untuk wisatawan yang ingin menikmati suasana alam yang tenang dan asri.

Dengan berbagai daya tarik tersebut, Desa Wisata Landorundun menawarkan pengalaman wisata yang kaya akan budaya, sejarah, dan keindahan alam, menjadikannya destinasi yang layak untuk dikunjungi bagi para pencinta wisata budaya dan alam.

Pengelolaan wisata di Desa Landorundun, Kabupaten Toraja Utara, melibatkan berbagai stakeholder yang memiliki peran strategis dalam pengembangan, pelestarian budaya, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Berikut adalah beberapa stakeholder utama beserta peran mereka dalam pengelolaan wisata di desa ini.

Pengelolaan wisata di Desa Landorundun membutuhkan sinergi antara berbagai stakeholder, termasuk pemerintah, masyarakat, investor, akademisi, NGO, dan wisatawan. Kolaborasi yang baik akan mendorong pengembangan wisata berbasis budaya dan ekologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta menjaga kelestarian adat dan lingkungan. Dengan pendekatan yang terintegrasi, Desa Landorundun dapat menjadi destinasi wisata berkelas dunia yang tetap mempertahankan keunikan budaya Toraja.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran pemerintah dalam tata kelola desa wisata di Kabupaten Toraja Utara sangat penting dalam memastikan keberlanjutan dan keberhasilan pariwisata berbasis masyarakat. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta strategi pemasaran yang efektif, desa wisata dapat berkembang menjadi destinasi unggulan yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya bagi masyarakat setempat. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci utama dalam mewujudkan desa wisata yang maju dan berkelanjutan.
2. Manajemen tata kelola pemerintahan desa wisata berbasis masyarakat di Kabupaten Toraja Utara memiliki dampak yang signifikan terhadap Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta kualitas hidup masyarakat desa. Pendekatan yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam pelestarian adat istiadat dan pengembangan pariwisata mampu meningkatkan ekonomi lokal, melestarikan budaya, serta menciptakan peluang kerja bagi penduduk setempat.
3. Dukungan dari stakeholder seperti pemerintah daerah, komunitas adat, dan sektor swasta berperan penting dalam menjaga keberlanjutan wisata desa. Dengan manajemen yang baik, desa wisata tidak hanya menjadi destinasi unggulan, tetapi juga berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat serta kelestarian budaya dan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adikampana, Imade. 2017. Pariwisata Berbasis Masyarakat. Bali : Cakra Pres.
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. Manajemen Pemerintahan Daerah. Yogyakarta. Graha Ilmu
- Aditama Soetomo. 2013. Pemberdayaan Masyarakat, Mungkinkah Muncul Anti Tesisnya? Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Affifuddin. 2010. Pengantar Administrasi Pembangunan. Bandung. Alfabeta
- Andriyani, Anak Agung Istri, Edhi Martono, dan Muhamad. 2017. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi Di Desa Wisata Penglipuran Bali.
- Arifin Utha, dan Eko Harianto. 2018. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa(Add) Dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Konawe, PUBLICUHO Faculty of Social and Political Sciences Halu Oleo University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia.
- Bambang, Sunaryo. 2013. Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta : Gava Medi.
- Baskoro, BRA & Rukendi, C. (2008). Membangun Kota Pariwisata Berbasis Komunitas; Sebuah Kajian Teoritis. Jurnal Kepariwisata Indonesia Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Indonesia, vol 3, no 1. hlm 5-7.
- Byars, Lloyd L dan Rue. Lesley W. 2006. Human Resources Management. Richard D Irwin Inc.
- Effendi, Usman. 2014. Asas Manajemen. Jakarta : Rajagrafindo Persada.
- I Gusti Bagus Rai dan Ni Made Eka Mahadewi. 2012. Metodologi Penelitian Pariwisata dan Perhotelan. Yogyakarta: Penerbit Andi Yoeti, Oka A. 2008. Pengantar Ilmu Pariwisata. Bandung: Angkasa.
- Jeffries, D, 2001. Government and Tourism. Oxford : Butterworth Heineman.
- Moleong, Lexy J. 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung. PT Remaja Rosdakarya
- Mudana, I Wayan. 2015. dalam penelitian yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat di Daerah Tujuan Wisata Desa Pemuteran dalam Rangka Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora. ISSN: 2303-2898 Vol. 4, No. 2, Oktober 2015. hal 598- 608 Peraturan Walikota Nomor 115 Tahun 2016
- Pendit, Nyoman S.. 2003. Ilmu Pariwisata: Sejarah dan Prospeknya. Jakarta: Pustaka Paramita
- Pitana, I Gede. 2005. Sosiologi Pariwisata. Yogyakarta: Andi

- Pitana, I Gde dan I Ketut Surya Diarta. 2009. Pengantar Ilmu Pariwisata. Yogyakarta: Andi Offset
- Rahim, Firmansyah, 2012. Pedoman Kelompok Sadar Wisata. Jakarta : Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- Sedarmayanti. 2014. Membangun dan Mengembangkan Kebudayaan dan Industri Pariwisata (Bunga Rampai Tulisan Pariwisata). Bandung: Refika
- Silalahi, Ulber. 2011. Asas-Asas Manajemen. Bandung. Refika Aditama
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung. Alfabeta
- Sule, Erni Tisnawati. Saefullah, Kurniawan. 2009. Pengantar Manajemen. Jakarta. Kencana Media Perdana Grup
- Sunaryo, Bambang. 2013. Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gava Medi
- Suwantoro, Gamal. 2004. Dasar-dasar Pariwisata. Yogyakarta: Andi Offset
- Syahputra, Hendra. (2017). Pengelolaan Obyek Wisata Berbasis Masyarakat di Hutan Pinus Desa Mangunan Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul Yogyakarta. Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yogyakarta.
- Tajudin, Jejen. (2018). Strategi Pengembangan Desa Wisata di Mangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PADES) Desa Mangunan, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul. Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yogyakarta.
- Terry, George R dan Rue, Lesley W. 2006. Dasar-dasar Manajemen. Jakarta. Bumi Aksara
- Undang-Undang No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.
- UNWTO 2017. Organisasi pariwisata dunia atau yang dikenal *dengan world tourism*. html hlm 2 tanggal 28 Februari 2021 Jam 14.00. Wawancara dengan Ahamd Dmyadi , Wali Nagari Saniang Baka, Saniang Baka , 11 November 2021.
- Widiyanti, Handini. (2016). Strategi Tata Kelola Pengembangan Ekowisata di Taman Wisata Alam Kawah Ijen Provinsi Jawa Timur. Tesis, Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Yoeti, Oka, A. (2008). Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata. Jakarta: Pradaya Pratama.
- Zaenuri, Muhammad. (2018). Tata Kelola Pariwisata Bencana Berbasis Collaborative Governance. Yogyakarta: Explore.
- Zubaedi. (2013). Pengembangan Masyarakat, Wacana dan Praktik. Jakarta: Kencana.